



Politeia : Jurnal Pemikiran Politik Islam

ISSN : 2621-0312

e-ISSN : 2657-1560

Vol. 4 No. 2 Tahun 2021

Doi : [10.21043/politea.v4i2.12350](https://doi.org/10.21043/politea.v4i2.12350)

<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea>

Relasi Qatar dengan Ikhwanul Muslimin dalam Kerangka *Nested Power*

Sidiq Ahmadi, Muhammad Adel Aditya

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

sidiqahmadi@umy.ac.id, muhadeladitya@gmail.com

Abstract

The Muslim Brotherhood (MB) is an obstacle that disrupts Qatar's relations with its neighbors in the Gulf, especially Saudi Arabia and the United Arab Emirates. Qatar's different position with the fellow Gulf countries towards Muslim Brotherhood became one of the problems that caused the estrangement of the relationship. The dispute led to demands that Qatar ends its support for the Muslim Brotherhood. However, Qatar remains unmoved in maintaining good relations with the Muslim Brotherhood. This article aims to answer why Qatar retains its relationship with the Muslim Brotherhood amid the severing of diplomatic ties from fellow Gulf countries. This research uses qualitative research methods with library studies. This study uses secondary data obtained from books, journals, and the internet, which are then interpreted and concluded utilizing the concept of nested power. This article finds that Qatar maintains its relationship with the Muslim Brotherhood to maintain national political stability by accommodating the Muslim Brotherhood in government circles, especially in education and da'wah. Meanwhile, Qatar utilizes the global MB network at the regional and international levels to lift Qatar's branding as an essential actor in the Muslim world and the Globe.

Keywords: Qatar, Muslim Brotherhood, Gulf States, Nested Power

Abstrak

Ikhwanul Muslimin merupakan suatu hal yang mengganggu hubungan Qatar dengan tetangganya di Teluk, terutama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Perbedaan posisi Qatar dengan sesama negara Teluk terhadap Ikhwanul Muslimin menjadi salah satu masalah yang menyebabkan kerenggangan hubungan tersebut. Perselisihan itu menyebabkan tuntutan agar Qatar mengakhiri dukungannya terhadap Ikhwanul Muslimin. Namun, Qatar tetap tidak mengubah hubungan baik dengan Ikhwanul Muslimin. Artikel ini bertujuan untuk menjawab mengapa Qatar mempertahankan hubungannya dengan Ikhwanul Muslimin di tengah pemutusan hubungan diplomatik dari sesama negara Teluk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, dan internet, yang kemudian diinterpretasikan dan disimpulkan dengan menggunakan konsep *nested power*. Artikel ini menemukan bahwa Qatar menjaga hubungannya dengan Ikhwanul Muslimin untuk menjaga stabilitas politik nasional dengan mengakomodasi Ikhwanul Muslimin di lingkungan pemerintahan, khususnya di bidang pendidikan dan dakwah. Sementara itu, Qatar memanfaatkan jaringan persaudaraan muslim global di tingkat regional dan internasional untuk mengangkat branding Qatar sebagai aktor penting di dunia Muslim dan global.

Kata kunci: Qatar, Ikhwanul Muslimin, Negara Teluk, Nested Power

Pendahuluan

Ikhwanul Muslimin (IM) menjadi kendala yang merenggangkan hubungan Qatar dengan negara tetangganya, utamanya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Perbedaan sikap dari Qatar dan negara-negara Teluk terhadap peran Ikhwanul Muslimin dalam Arab Spring menjadi salah satu permasalahan yang menjadi sebab kerenggangan hubungan tersebut. Pemerintah Qatar menyambut baik peran menonjol IM dalam Arab Spring seperti dalam kasus kemenangan partai bentukan IM dan terpelihnya kandidat yang berasal dari IM dalam pemilu Mesir. Dukungan terhadap kemenangan Muhammad Morsi dan Freedom and Justice Party (FJP), partai yang berisi orang-orang IM, dalam pemilihan umum Mesir pasca jatuhnya Husni Mubarak, ditunjukkan dengan pemberian bantuan, baik secara moril ataupun materil.

Sementara itu, negara-negara teluk yang lain memberikan sikap berbeda terhadap gerakan IM dan keterlibatannya dalam Arab Spring. Dalam sebuah sesi wawancara dengan majalah *Atlantic*, Raja Jordan, Raja Abdullah, menanggapi terjadinya Arab Spring dengan sebuah kekhawatiran dan mengatakan, “sebuah ‘bulan sabit’ Ikhwanul Muslimin berkembang di Mesir dan Turki,” sebuah ‘bulan sabit’ yang disorot Arab Spring. Dia menambahkan IM adalah organisasi yang dijalankan oleh ‘serigala berbaju domba’ dan harus dicegah dari mendapatkan kekuasaan dimanapun dalam kawasan (Baskan, 2016, hal. 125). Jordan tidak sendiri, kebijakan *containment* terhadap pengaruh IM selama dan pasca Arab Spring juga dijalankan oleh aktor-aktor penting Timur Tengah dan teluk, utamanya yang disebut di atas, Arab Saudi dan UEA. Salah satu usahanya dengan memberikan dukungan terhadap pemerintahan hasil kudeta militer yang menggulingkan Muhammad Mursi, kemudian menyatakan IM sebagai organisasi teroris kepada publik domestik dan internasional.

Dikudetanya Muhammad Mursi di Mesir tidak menghentikan kebijakan luar negeri Qatar yang terlihat pro-IM. Melalui pernyataan diplomatik, Qatar menunjukkan posisinya, yang menyayangkan tindakan keras pemerintahan hasil kudeta militer kepada pendukung Mursi, dan juga penahanan Mursi sendiri, serta mengecam kebijakan pemerintah Mesir yang mencap IM sebagai organisasi teroris. Melalui media al-Jazeera, yang berbasis di Qatar, persoalan tentang IM juga mendapatkan porsi tayang banyak. Qatar juga memberikan suaka kepada pendukung Mursi yang melarikan diri. Secara garis besar, dukungan Qatar kepada IM secara diametris sangat bertentangan dengan tanggapan kawasan terhadap Arab Spring di negara teluk yang lain (Ulrichsen, 2014, hal. 154). Pukulan awal paling keras dialami Qatar pada Maret 2014. Tiga negara teluk, Arab Saudi, UEA, dan Bahrain, menarik duta besarnya dari Qatar. Tuduhannya, selain Qatar telah mengintervensi urusan dalam negeri negara lain, seperti dikutip dari laporan al-Jazeera tertanggal 10 April 2014 dalam Baskan (2016, hal. 127), Qatar juga telah mendukung sebuah organisasi (IM) yang merupakan sebuah ancaman bagi “keamanan dan stabilitas” negara-negara GCC. Saat itu Qatar mendapati diri terisolasi. Ketiga negara yang menarik duta besarnya, baru bersedia untuk mengirim kembali serta memperbaiki hubungan dengan Qatar pada November 2014 setelah adanya usaha pertemuan antar perwakilan negara dalam lingkup GCC (al-Jazeera.com, 17 November 2014).

Layaknya *de ja vu*, tiga tahun berselang Qatar mengalami hal yang sama dengan konsekuensi yang lebih berat. Arab Saudi, UEA, dan Bahrain memutus hubungan dengan Qatar pada 5 Juni 2017 (bbc.com, 19 Juli 2017). Tindakan kali ini lebih berat, karena tidak hanya berada pada tingkat *high politics*. Ketiga negara tersebut memberikan waktu 14 hari kepada warga negara Qatar untuk meninggalkan wilayah mereka dan melarang warga negara mereka sendiri untuk berpergian atau berada di Qatar. Ditambah lagi, ketiga negara tersebut, plus Mesir, menutup wilayah udara mereka dari penerbangan pesawat dan maskapai Qatar, bahkan mengharuskan penerbangan dari maskapai asing lain dengan tujuan atau berangkat dari Qatar, harus meminta izin terlebih dahulu jika akan melewati ruang udara mereka. Arab Saudi juga menutup satu-satunya perbatasan darat yang dimiliki Qatar dengan negara tetangganya, serta melarang kapal dengan bendera Qatar atau yang melayani urusan Qatar untuk berlabuh. Pengaruhnya langsung dirasakan masyarakat Qatar, apalagi di tengah tingginya interdependensi antara negara-negara teluk. Tidak lama setelah pengumuman pemutusan hubungan tersebut, masyarakat memadati supermarket karena khawatir akan terjadinya kelangkaan kebutuhan pokok. Bandara Internasional Hamad di Doha sepi, Qatar Airways, maskapai penerbangan negara, harus membatalkan 18 penerbangan ke kota-kota kawasan dan mengubah rute banyak penerbangan internasional yang lain. Empat pekan pertama setelah pemutusan hubungan berlaku, pasar saham Qatar anjlok hingga 10%, atau sekitar 15 triliun dollar AS. Tidak heran jika kejadian ini disebut sebagai Krisis Diplomati Qatar.

Ironisnya, tuntutan yang dilayangkan kepada Qatar tidak jauh beda dengan yang terjadi pada 2014. Dari 13 poin tuntutan yang diajukan ketiga negara pemutus, BBC (bbc.com, 19 Juli 2017) merangkum dua sebab utama yang melatarbelakangi kemarahan negara pemutus kepada Qatar, yaitu pertama hubungan dekatnya dengan Iran, dan kedua dukungannya kepada kelompok-kelompok *Islamist*, utamanya IM. Tanggapan pemimpin Qatar, seperti yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Mohammad bin Abdul Rahman al-Thani, dikutip oleh BBC (bbc.com, 19 Juli 2017), bahwa jika tetangganya “menuntut kita harus menyerahkan kedaulatan kita,” dengan penekanan ia lanjut mengatakan “tidak akan.” Dua kali kejadian dengan tuntutan yang sama, bahkan yang terakhir berdampak hingga akar rumput kehidupan masyarakat, pertanyaannya ada apa dengan Qatar dan IM, hingga Qatar bersikeras tidak mengubah hubungannya dengan IM seperti yang diminta oleh para tetangganya.

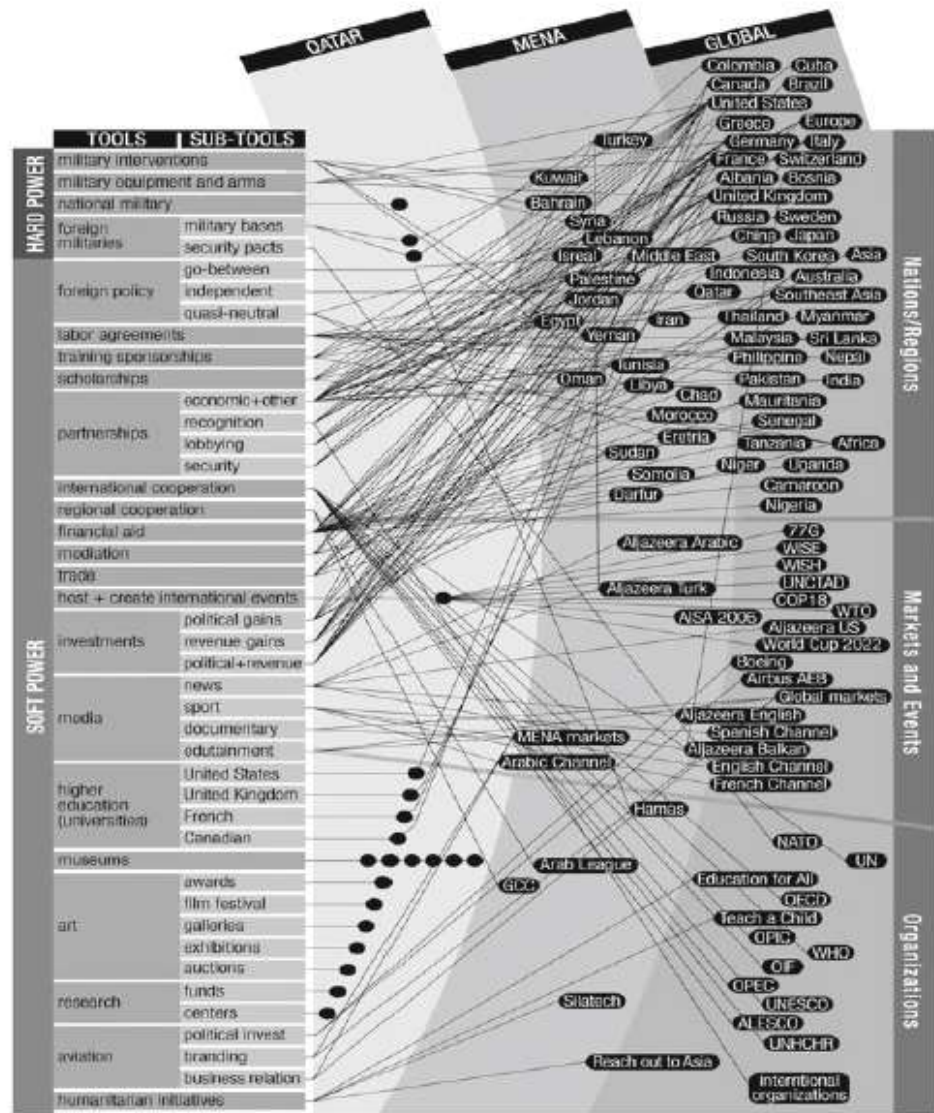
Pembahasan

Nested Power Theory

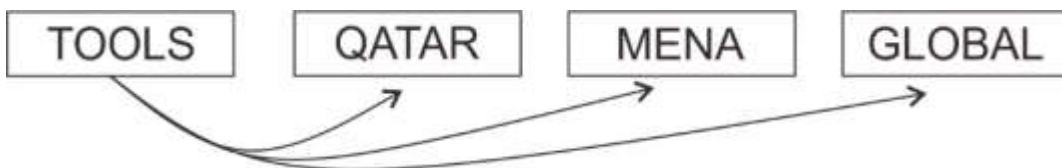
Maksud Nested Power di sini adalah kemampuan sebuah negara untuk menggunakan berbagai macam alat-alat dan sumber daya-sumber daya, pada tingkat domestik, regional, dan internasional, dengan tujuan untuk memanfaatkan mereka demi mendapatkan hasil tertentu (Al Horr dkk., 2016, hal. 348). Definisi tersebut memperlihatkan dua aspek dari *nested power*, yaitu alat-alat dan sumber daya-sumber daya, atau kekuatan (*instrument of power*); dan tingkat interaksi (*level of interaction*) yang

terbagi menjadi tiga, lokal, regional, dan internasional. *Instrument of power* yang menyusun *nestedness* suatu negara dapat bervariasi, mencakup *hard power* dan *soft power*. Beberapa rupa varian kekuatan tersebut misalnya, intervensi militer, perjanjian keamanan, jual beli senjata, pengadaan pangkalan militer, investasi, kebijakan luar negeri, media, penerbangan, *event* internasional, perjanjian buruh migran, pendidikan, penelitian, seni, *sponsorship*, beasiswa, pelatihan, mediasi, bantuan finansial, kerjasama internasional, *partnership* dan aliansi, olahraga, kerjasama regional, *entertainment*, penghargaan, *branding*, perdagangan, dan *lobbying*. Bagi Qatar, seperti yang dituliskan Al Horr dkk. dalam *Policy Making in a Transformative State, the Case of Qatar* (2016, hal. 363), kebijakan Qatar dengan mengandalkan *nested power*-nya menggambarkan bagaimana pemerintah Qatar telah secara strategis berinvestasi dalam beberapa alat-alat kekuatan (*power tools*) tertentu dan menggunakan mereka secara independen dan interdependen untuk membuat sebuah masyarakat yang modern, progresif, dan unik.

Interaksinya dengan tiga tingkat yang berbeda juga mencerminkan bagaimana kepentingan-kepentingan yang bervariasi tergantung pada ruang lingkungannya. Menurut Al Horr dkk. (2016, hal. 354), prestise dan pengaruh yang telah dibangun Qatar selama bertahun-tahun adalah hasil langsung kemampuan pemerintah Qatar menggunakan beberapa instrumen kekuatan yang berbeda dengan tujuan untuk menciptakan imej dan *branding* negaranya dan memperlihatkannya ke seluruh dunia.



Gambar 1.1 Model teori *nested power* (Al Horr dkk., 2016, hal. 356)



Gambar 1.2 Model teori *nested power*.

Lebih lanjut, Al Horr dkk. (2016, hal.354) kembali mendefinisikan *nested power* sebagai penggunaan beberapa alat dan sarana, pada semua tingkat, dan memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan multi-dimensi mencakup *branding*, *positioning*, *attracting*, dan *hedging*. *Branding* sendiri di sini memiliki maksud yang sama dengan istilah *branding* pada praktek pemasaran, tapi dengan negara sebagai objeknya, bertujuan untuk membuatnya dikenal luas. *Positioning* maksudnya adalah menempatkan atau mengatur posisi suatu negara dalam konteks politik internasional. *Attracting* adalah memikat atau menarik subjek-subjek lain untuk berinteraksi. *Hedging* yaitu mengikat, dalam arti hubungan erat dengan salah satu aktor internasional tertentu. Melalui *nested power*, dimungkinkan untuk memahami bagaimana suatu negara dapat menjalin hubungan dengan berbagai macam aktor-aktor internasional, walaupun antar aktor-aktor tersebut ada yang saling berkonflik.

Dalam konteks kajian ini, pembahasan bermaksud membuktikan bahwa IM adalah bagian dari *nested power* yang dimiliki Qatar. Terlebih dahulu dengan mengkategorikan IM ke sebagai *tools*. Klasifikasi ini dapat terjadi karena kemampuan Qatar untuk merangkul IM ke dalam jaringannya merupakan salah satu dari investasi politiknya. Faktanya tidak semua negara dapat melakukan seperti apa yang Qatar lakukan, memberikan ruang-ruang gerak bagi IM. Kemudian dengan mengkaji seberapa penting IM bagi Qatar dalam tiga tingkat interaksi, lokal, regional, dan internasional. Pada tingkat lokal, pembahasan akan berkaitan dengan bagaimana IM berpengaruh dalam kehidupan politik pemerintahan dalam negeri Qatar, sosial kultural masyarakat Qatar, serta pembangunan nasional (*nation building*) yang dicanangkan pemerintah. Di tingkat regional, analisa akan berfokus pada posisi strategis IM dalam kepentingan nasional Qatar di kawasan Timur Tengah. Kemudian pembahasan di tingkat internasional berisi tentang pengaruh IM dalam kepentingan nasional Qatar secara global. Hasil pengkajian pada tiga tingkat interaksi ini sendirinya akan menjawab mengapa Qatar bersikeras mempertahankan hubungannya dengan IM. Selain itu, sesuai dengan pembahasan Al-Horr dkk., maka pengkajian tentang hubungan Qatar dan IM juga tidak terlepas dari tujuan *branding*, *positioning*, *attracting*, dan *hedging*. Memasuki akhir pembahasan di tiap tingkatannya, salah satu dari keempat tujuan tersebut dapat digunakan sebagai kesimpulan.

Sejarah Kehadiran Ikhwanul Muslimin di Qatar

Berbicara tentang gerakan Islam internasional, Ikhwanul Muslimin memiliki posisinya tersendiri. Berangkat dari tokoh pendirinya, Hasan al-Bana, lahir pada 1906 di Mahmadiyah, Islamiyah, dari keluarga yang terdidik secara Islami dan menjadi seorang guru setelah lulus dari Universitas Darul Ulum, Kairo, pemahamannya tentang perbedaan antara idealita Islam dan realita yang dialami masyarakat negerinya kala itu mengarah pada terbentuknya jamaah IM pada 1928 di Ismailiyah. Secara sederhana, Ruslan dalam Ulfah (2016: 217), memabakkan perkembangan IM dalam empat fase, yaitu fase perintisan (1928-1932) ditandai dengan fokus kepada gerakan dakwah dan tarbiyah; fase pembinaan dan perkembangan (1932-1939) ditandai dengan berpindahnya kantor pusat dari Ismailiyah ke ibu kota Kairo; fase pembinaan dan perjuangan (1939-1952), ditandai dengan pendirian cabang-cabang secara lebih menyeluruh di daerah-daerah; dan fase

revolusi (1952-1954) ditandai dengan semakin massifnya pengaruh IM dalam politik nasional, persinggungan dengan penguasa yang salah satu akibatnya adalah kematian Hasan al-Bana. Fase yang mengarah pada revolusi ini memperlihatkan adanya proses pembentukan kelompok oposisi yang berangkat dari bawah, yang dalam alam pikiran para pemimpin otoriter Timur Tengah dapat diartikan sebuah bahaya bagi stabilitas politik mereka.

Mengutip kalimat dari Tempo (30 September 2001), "Tewas 52 tahun silam karena dibunuh orang-orang tak berwajah, Hasan al-Bana tetap masih hidup." Perjuangan Hasan al-Bana bersama koleganya di IM menjadi ikon perjuangan gerakan Islam. Ide-idenya tetap dibaca, diamalkan, dan berkembang di belahan dunia. IM menginspirasi sedikit banyak gerakan-gerakan Islam di belahan dunia, baik yang radikal, moderat hingga menggunakan kekerasan. Walau Hasan al-Bana sendiri menggarisbawahi penggunaan kekuatan fisik adalah yang terakhir, setelah kekuatan aqidah dan agama pertama, disusul kekuatan persatuan dan ikatan (Ishaq, 2012: 59). "Islam adalah solusi," slogan IM yang paling terkenal ini secara sederhana memperlihatkan arah ideologis gerakan. Ide dasar yang ditawarkan IM adalah komprehensifitas nilai-nilai Islam, yang bukan hanya agama tentang ibadah, tapi menyentuh seluruh aspek kehidupan. Tujuan IM adalah mewujudkan terbentuknya sosok individu muslim, rumah tangga Islami, bangsa yang Islami, pemerintahan yang Islami, negara yang dipimpin oleh negara-negara Islam, menyatukan perpecahan kaum muslimin dan negara mereka yang terampas, kemudia membawa bendera jihad dan dakwah kepada Allah sehingga mendapatkan ketentraman dengan ajaran-ajaran Islam (Jatmika, 2014: 42). Sehingga dari sini, dapat disimpulkan IM merupakan gerakan Islam dan memiliki tujuan menerapkan Islam dalam seluruh aspeknya, termasuk dalam kehidupan social politik secara gradual. Ide dan tujuan tersebut diejawantahkan melalui aktivitas-aktivitas organisasi IM yang mendorong aktivisme politik dan responsibilitas sosial (al-Jazeera, What is the Muslim Brotherhood?, 2017).

Di Qatar, kehadiran IM mulai tercatat sejak sekitar 1950-an silam (Karoui, 2018, hal. 29). Abd al-Badi Saqr, seorang sarjana pendidikan yang juga salah satu pimpinan IM di Mesir, memainkan peranan penting menginisiasi pengaruh IM di Qatar. Kehadiran Abd al-Badi Saqr pada 1954 berangkat dari latar belakang transformasi sosial yang saat itu terjadi di Qatar, yaitu pertumbuhan jumlah penduduk yang berbarengan dengan naiknya industri perminyakan. Pra-1950-an, semenanjung Qatar yang berpopulasi hanya sekitar 10.000-16.000 jiwa, menggantungkan *survival*-nya pada industri mutiara dan perikanan. Di tengah masyarakat yang coraknya masih tradisional, struktur pemerintahan pun belum tertata dengan rapi. Transformasi Qatar baru terjadi memasuki 1950-an, saat pemasukan melalui minyak mulai mengalir. Jumlah penduduk pun naik, mencapai 25.000 jiwa, yang berdampak pada semakin dibutuhkannya sektor-sektor pemerintahan di berbagai bidang. Pendidikan adalah salah satunya; sebelum 1950 di Qatar hanya terdapat sekolah informal dan lokal, dan basisnya keagamaan dengan satu guru (seperti pondok pesantren tradisional di Indonesia), sementara pada 1950-51, hanya ada satu sekolah formal, dengan murid berjumlah 240 laki-laki dan tidak ada perempuan. Hal ini mendorong pemimpin Qatar saat itu, Ali bin Abdullah al-Thani, pada 1951-52 mengamanahkan Jassim al-Darwish untuk memimpin panitia perancangan sistem sekolah. Sementara itu, pada

1950-an, seperti yang juga terjadi di tempat lain dalam kawasan, anggota-anggota IM hadir khususnya mengisi sektor pendidikan (Roberts D. , 2014).

Nama-nama penting di kalangan IM kemudian semakin banyak datang ke Qatar memasuki 1960-an. Kepala pendidikan agama Islam di departemen pendidikan saat itu, Abdullah bin Tukri al-Subai, menginisiasi lawatan ke Al-Azhar untuk merekrut pengajar dan cendekiawan (Roberts D. B., 2014). Beberapa nama penting yang menerima panggilan al-Subai salah satunya Ahmed al-Assal, tiba di Qatar tahun 1960, dan langsung menggeluti aktivitas di bidang pendidikan dan kegamaan seperti mengajar di sekolah dan memberikan ceramah di masjid-masjid, serta yang juga penting adalah membantu pembentukan kelompok IM di sana. Kemudian ada Abdel-Moaz al-Sattar, utusan pribadi Hassan al-Banna untuk Palestina pada 1946, bekerja sebagai peninjau sekolah, direktur pendidikan agama Islam di bawah Kementrian Pendidikan, dan ikut menyusun berbagai buku pelajaran untuk sistem pendidikan Qatar yang baru di awal 1960-an. Nama penting lain di antara kader-kader IM yang datang adalah Dr. Kemal Naji, yang pernah memimpin berbagai posisi di sektor pendidikan Qatar seperti direktur pendidikan dari 1964 sampai 1979 di bawah Jassim bin Hamad al-Thani, kepala komite penerbitan, dan penasehat hubungan luar negeri di bidang kebudayaan pada Kementrian Pendidikan. Hingga sekarang, rekrutan al-Subai yang paling terkenal adalah Yusuf al-Qaradawi, yang meninggalkan Mesir menuju Qatar pada 1961. Mulanya dia terlibat dalam institusi keagamaan, selanjutnya mendirikan dan menjadi dekan Fakultas Syari'ah di Universitas Qatar (Roberts D. , 2014). Selain menempati pos-pos strategis saat itu, kader-kader IM di Qatar menggunakan posisinya untuk mengundang berbagai nama-nama penting lain untuk mengisi kuliah umum ataupun ceramah seperti Muhammad Qutb, adik dari Sayyid Qutb; Muhammad al-Ghazzali dan Abdul-Wafa al-Taftazani, dua orang pimpinan penting IM. Mudah-mudahan akses keluar masuk anggota-anggota IM di Qatar, termasuk berbagai macam aktivitasnya di dalam negeri, selama 1960-an menjadi titik awal dari relasi Qatar dan IM seterusnya.

Ikhwanul Muslimin sebagai Bagian dari Nested Power Qatar

Kontribusi IM dalam Pendidikan di Qatar

Berkaca dari tujuan transformatif Qatar yang dituliskan oleh Al-Hor dkk. (2016, hal. 363), tentunya sektor pendidikan punya relevansi kuat ke arah sana. Perkembangan suatu masyarakat secara spesifik, atau transformasi suatu negara secara umum, tidak dapat terlepas dari pendidikan. Demi mencapai tujuan transformatif tersebut, Qatar telah beberapa kali melakukan reformasi pendidikan. Beberapa kali dilakukan pada 1970-an dan 1980-an. Reformasi pendidikan paling anyar dilakukan pada 1990-an, dimana Qatar menggaet RAND Corporation dari AS untuk memberikan rekomendasi berdasarkan analisa komprehensif terhadap kelemahan-kelemahan pendidikan mereka (Nasser, 2017, hal. 2). Hasil dari reformasi terkahir inilah yang sampai saat ini masih dipakai. Meski saat ini pendidikan di Qatar lebih condong mengacu pada konsep-konsep Barat, tapi kontribusi penting IM telah ada jauh ke belakang apabila ditinjau dari segi historis. Kedatangan IM pertama kali ke Qatar berbarengan dengan dimulainya pembangunan pendidikan negara

tersebut. Tahun 1950-an, sektor pendidikan Qatar mulai bertransformasi dari sistem pendidikan tradisional, menuju sistem pendidikan modern. Referensi dari sistem pendidikan baru tersebut, pada masa itu, adalah Mesir. Rekrutmen guru-guru dilakukan di Mesir. Konsultan-konsultan pendidikan juga dicari dari Universitas Al-Azhar. Tidak sampai di sana, kurikulum Qatar yang pertama didasarkan pada kurikulum pendidikan di Mesir. Mesir dipilih karena sistem pendidikan di sana dipandang lebih maju dan sesuai dengan kebudayaan masyarakat Qatar. Kesesuaian itu terdapat pada nilai kebudayaan Islam, dimana Mesir memperlihatkan kemajuan yang signifikan dalam pengembangan pendidikan Islam yang dipadukan dengan pendidikan umum. Mengingat sistem pendidikan tradisional Qatar yang menitikberatkan pada pelajaran agama, maka terdapat benang merah yang mempermudah transisi menuju sistem pendidikan modern Mesir yang menyeimbangkan pendidikan agama dan umum. Proses inilah yang menjadi titik akses kehadiran IM di Qatar. Al-Kobaisi (1979, hal. 123) mencatat, pada waktu itu sebagian besar guru yang direkrut untuk mengajar pada sekolah-sekolah di Qatar secara ideologis mendukung IM. Tinjauan historis ini memberi kesimpulan bahwa IM berkontribusi dalam membangun fondasi sistem pendidikan di Qatar. Pemanfaatan IM dalam pengembangan sistem pendidikan ini adalah salah satu bentuk penggunaan *nested power* di dalam negeri yang dilakukan oleh Qatar.

Dominasi konsep-konsep pendidikan Barat yang dibawa oleh RAND Corporation ke Qatar kini memang membuat pengaruh IM pada sektor ini berkurang, tapi bukan berarti mereka hilang sama sekali. Pengajar-pengajar 'berhaluan' IM tetap ada berseliweran di sekolah-sekolah Qatar. Seperti yang ditemukan dalam catatan Freer (2018, hal. 155), seorang narasumber menjelaskan "Guru-guru umumnya perempuan dan datang dari lingkungan konservatif di Mesir, Yordania, Suriah. Sebagian besar memiliki sikap keagamaan yang konservatif, mereka simpati dengan Ikhwanul Muslimin, walaupun mereka mungkin tidak terlibat dalam politiknya." Penggunaan kurikulum yang mengacu pada Barat, yang mana alirannya cenderung sekuler, menimbulkan kekecewaan tersendiri pada sebagian masyarakat Qatar. Kekecewaan tersebut berupa jarang digunakannya Bahasa Arab sebagai bahasa pengantar di beberapa sekolah serta berkurangnya pendalaman pada mata pelajaran agama Islam. Pengurangan penggunaan Bahasa Arab sebagai bahasa pengantar khususnya, menimbulkan perdebatan di masyarakat dan menyebabkan ketegangan antara penduduk asli dan pendatang (Al Horr dkk., 2016, hal. 155). Penduduk asli menganggap pemerintah membuka pendidikan baru hanya untuk para pendatang, setelah banyak calon murid dari penduduk asli tidak dapat lolos seleksi karena kemampuan Bahasa Inggris yang kurang. Pemerintah segera bergerak cepat dengan merevisi beberapa poin kurikulum terkait penggunaan bahasa pengantar, dan menyeimbangkan penggunaan bahasa asing dan Bahasa Arab. Kejadian ini menunjukkan perubahan-perubahan terkait dengan kurikulum akan terus terjadi menyesuaikan dengan zaman dan tuntutan masyarakat. Saat ini konsep yang dominan adalah Barat, tapi tidak menutup kemungkinan ke depan konsep pendidikan Islam lebih populer. Masyarakat pun masih banyak yang tetap menginginkan karakter pendidikan sesuai dengan nilai kebudayaan mereka, kebudayaan Arab dan Islam; sebuah ruang yang pastinya dikuasai oleh pengajar-pengajar dari IM. Selama pendidikan masih menjadi prioritas pembangunan di Qatar, selama itu pula kehadiran IM melalui kader-kadernya masih dibutuhkan.

IM dan Stabilitas Politik Qatar

Satu hal lain yang berpengaruh terhadap transformasi dan pembangunan suatu negara, adalah stabilitas politik dalam negeri. Ake (1975, hal. 273) mendefinisikan stabilitas politik sebagai keteraturan dari mengalirnya pertukaran politis (maksudnya transaksi, komunikasi, dan kebijakan lainnya yang dilakukan antar aktor politik). Semakin teratur aliran tersebut, kondisi politik suatu negara semakin stabil. Terkadang, pertukaran politis ada yang berdasarkan pada pola kebiasaan dari aktor politik, dan ada pula berdasarkan batasan-batasan tersendiri yang ditentukan oleh penguasa. Ketidakstabilan politik (*political instability*) akan terjadi apabila aktor-aktor politik melakukan aktivitas yang keluar dari pola kebiasaan dan batasan-batasan yang telah ditetapkan tadi. Kuznets dalam Radu (2015, hal. 752) menekankan stabilitas politik adalah sebuah kebutuhan jika anggota-anggota masyarakat ekonomi (investor, dan sebagainya) akan membuat rencana-rencana pembangunan ke depan, serta menjamin hubungan yang stabil antara kontribusi mereka pada aktivitas ekonomi dan hasil yang mereka dapatkan. Sementara ketidakstabilan politik hanya akan menimbulkan pengaruh buruk terhadap pembangunan. Radu (2015, hal. 752) menuliskan paling tidak terdapat dua dampak negatif ketidakstabilan politik terhadap pembangunan, yaitu mengganggu aktivitas pasar dan hubungan buruh, serta merendahkan tingkat investasi karena situasi lingkungan yang tidak stabil. Bagi negara yang mengejar transformasi dan pembangunan seperti Qatar, maka kestabilan politik tentu menjadi salah satu prioritas yang harus diwujudkan.

Salah satu penyebab yang dapat menimbulkan ketidakstabilan politik adalah kehadiran oposisi sebagai aktor politik dalam sistem politik di suatu negara. Oposisi mencoba untuk bekerja di luar pola-pola interaksi politis yang sudah ada. Mereka dapat mempengaruhi aktor-aktor lain, dan memanipulasi berjalannya sistem, sehingga membentuk pola-pola interaksi baru, yang berakibat pada terciptanya ketidakstabilan politik. Dampak negatif ketidakstabilan politik itulah yang kemudian coba untuk dihindari pemerintah suatu negara. Melihat potensi yang bisa diakibatkan oleh berkembangnya gerakan oposisi, salah satu cara pemerintah suatu negara menjaga kestabilan politiknya adalah dengan membatasi gerakan oposisi, atau bahkan secara keras memberangus pergerakannya. Gambaran seperti itulah yang terjadi antara IM dan beberapa negara-negara Teluk. IM dianggap sebagai oposisi potensial yang mempunyai kemampuan untuk membuat ketidakstabilan politik, dan demi menjaga kestabilan politik, negara-negara mengeluarkan tindakan keras terhadap mereka. Seperti yang ditulis oleh Dickinson (Hedges & Cafiero, 2017, hal. 129) misalnya, setelah kejadian bergejolaknya dunia Arab pada 2011 (*Arab springs*), Arab Saudi dan UEA secara aktif menekan anggota GCC lain untuk ikut serta mengambil tindakan keras terhadap IM, dalam sebuah upaya untuk membangun sebuah "lingkungan keamanan bebas IM" (*Muslim Brotherhood-free security environment*) di semenanjung Arab.

Kasus Qatar, seperti mencoba untuk mematahkan premis-premis di atas. Qatar butuh kestabilan politik sebagai prasyarat pembangunan negaranya, tapi Qatar juga membangun relasi dengan IM, yang dianggap oleh negara Teluk lain sebagai oposisi yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan. Perilaku ini sekilas tampak seperti sebuah ironi, tapi jika ditinjau menggunakan konsep *nested power* dapat terlihat bagaimana suatu

negara dengan strategis mempergunakan alat-alat kekuatannya. Bagaimana Qatar menggunakan IM pada dimensi lokal (di dalam negeri) justru menunjukkan perspektif unik yang dimiliki negara ini. Kestabilan dapat terjaga, apabila terjalin komunikasi-komunikasi, atau kesepakatan, antar elite. Relasi yang terbangun antara Qatar dan IM sendiri jika ditilik lebih spesifik adalah relasi antar elite. Warren (2017) menekankan lebih jauh bahwa relasi ini tidak hanya sekedar kesepakatan belaka, atau *realpolitik*, tapi sebuah hubungan personal yang dalam. Gambaran jelas dari relasi antar elite dapat dilihat dari kedekatan antara keluarga Al-Thani dengan Syekh Yusuf Qaradhawi. Dalam kasus ini kita dapat melihat bahwa IM di Qatar tidak memerankan diri sebagai oposisi terhadap rejim sebagaimana yang diperankan oleh IM di negara otoriter lain di Timur Tengah. Relasi antar antar elite yang dibangun antara IM dan Qatar mampu mengkomodasi kepentingan ideologis dan praktis IM.

Keluarga kerajaan Qatar sudah lama menjadi pendukung penting Qaradawi, mulai dari memberikan dia ruang-ruang untuk menyampaikan ceramahnya, sampai mendanai kunjungan-kunjungan luar negerinya di sekitaran Asia, hingga Eropa. Qaradhawi sendiri memiliki pengaruh yang tidak kalah penting bagi gerakan IM. Dua kali sudah Qaradhawi mendapat tawaran untuk menjadi ketua umum (*mursyid 'aam*) IM, dan kesemuanya dia tolak, tapi sudah lama pula, baik pengamat dari luar maupun anggota dari IM sendiri, menganggap dia sebagai pemimpin spiritual gerakan (Warren D. H., 2017). Perkataan-perkataan Qaradhawi terkadang dianggap oleh sebagian kalangan sebagai suara dari gerakan IM, pun juga bagi anggota IM, fatwa dari Qaradhawi memiliki peran penting dalam memberikan basis moril aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan. Posisi strategis Qaradhawi ini secara spesifik juga termasuk mendukung gerakan-gerakan perlawanan yang digaungkan jaringan-jaringan IM di suatu negara. Pengaruh ini paling jelas dapat terlihat ketika kejadian Arab Spring lalu. Warren (2017) mencatat selama Arab Spring pada 2011, Qaradhawi menggunakan posisinya di Al-Jazeera (utamanya lewat program ceramahnya, "Sharia and Life") dan kepemimpinan di IUMS (International Union of Muslim Scholars, jaringan internasional ulama-ulama di dunia yang didirikan di Qatar) untuk memberikan legitimasi dari sudut pandang hukum Islam kepada pergolakan yang terjadi di kawasan. Dukungan Qaradhawi ketika Arab Spring lalu tidak hanya diberikan kepada para demonstran. Pengecualian terjadi pada kasus Bahrain, dimana Qaradhawi justru mendukung pemerintah daripada para oposisi. Hal ini tidak terlepas dari kondisi politik Bahrain yang dipimpin oleh pemerintahan minoritas Sunni, dengan warga yang mayoritasnya Syi'ah. Qaradhawi juga vokal mendukung pemerintahan hasil pemilihan umum Mesir di bawah Muhammad Mursi, dan mengecam kudeta militer yang menggulingkannya setahun kemudian, kemudian menyerukan pendukung Mursi untuk turun ke jalan menentang pemerintahan hasil kudeta. Kedua kasus ini memperlihatkan bagaimana pengaruh seorang Qaradhawi dalam sebuah dinamika politik. Kapasitasnya sebagai ulama membuatnya didengar banyak orang, dan diyakini oleh anggota-anggota IM, kemanapun arahnya.

Kembali tentang stabilitas Qatar. Kapasitas Qaradhawi dan kedekatannya dengan keluarga Al-Thani, berangkat dari kasus-kasus utamanya selama Arab Spring, memperlihatkan sebuah benang merah. Ditinjau menggunakan konsep *nested power*, maka Qatar menggunakan kedekatannya dengan elite-elite IM, Syekh Yusuf Qaradhawi

khususnya, untuk menjaga stabilitas politik negaranya. Kesimpulan ini dapat terlihat selama fenomena Arab Spring berlangsung, Qatar sama sekali tidak merasakan pergolakan yang dialami oleh negara-negara lain di kawasan. Bahkan sebelum Arab Spring sekalipun, gerakan-gerakan oposisi berbasis Islamis tidak pernah terlihat di Qatar. Memang terdapat gerakan-gerakan oposisi di Qatar, di tingkat masyarakat, tapi basisnya cenderung sekuler-liberal, dan juga oposisi di lingkungan keluarga kerajaan, tapi hanya mempersoalkan kekuasaan saja tanpa ada embel-embel agama. Qatar berhasil menekan munculnya gerakan-gerakan oposisi Islamis muncul di negaranya, tapi bukan dengan cara melakukan penangkapan dan penindakan yang keras. Layaknya sebuah transaksi, stabilitas politik dalam negeri Qatar terjaga, dan gerakan-gerakan Islamis memiliki kebebasan beraktivitas yang luas di dalam wilayah Qatar. Terkhusus untuk IM, dukungan moral dan material juga diberikan. Inilah perspektif unik yang dimiliki oleh Qatar, yang membuatnya berbeda dengan negara lain, tercermin dalam penggunaan *nested power*-nya di tingkat lokal.

Nested Power dalam Dimensi Regional: IM dan Independensi Politik Qatar di Timur Tengah

Hidup dalam ekosistem geopolitik dengan karakter seperti kawasan Teluk Arab memanglah tidak mudah, apalagi jika posisi dan kekuatan geografis antar negara-negara di sana tidak seimbang. Latar belakang tempat itulah yang dirasakan oleh Qatar. Sebagai sebuah negara bangsa, Qatar dapat tergolong sebagai negara kecil (*small states*). Banyak ahli mendefinisikan negara kecil dilihat dari ukuran populasinya. Kategori ini mencakup negara dengan jumlah penduduk berada di bawah angka 10 atau 15 juta jiwa (Thorhallsson, 2018, hal. 18). Secara kasat mata, luas wilayah yang dimiliki suatu negara juga berpengaruh terhadap pengkategorian negara kecil. Melalui tinjauan komparatif, membandingkan luas wilayah negara di peta, khususnya dalam lingkup kawasan atau regional, besar-kecilnya negara dapat terlihat dengan jelas. Karakter ini kemudian menjadi satu dari sekian faktor yang mempengaruhi pilihan kebijakan luar negeri suatu negara.

Tantangan terbesar dari negara kecil adalah keamanan dan kedaulatan. Ukuran memang menjadi faktor khusus yang membuat negara-negara kecil memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap ancaman di dua bidang tersebut. Adanya kesenjangan antara negara kecil dan negara besar menimbulkan suatu dilema tersendiri. Tidak dapat dipungkiri, ukuran yang besar secara psikologis memunculkan potensi untuk mendominasi pihak dengan ukuran yang lebih kecil. Dominasi ini dapat berbentuk atau terlihat secara fisik seperti aneksasi atau invasi, maupun tidak secara fisik berupa hegemoni. Sudah cukup banyak kasus Hubungan Internasional yang terjadi untuk membuktikan kecenderungan ini, misalnya aneksasi Tibet oleh China pada 1950, invasi Iraq di bawah pimpinan Saddam Husein ke Kuwait pada 1990, dan yang paling baru aneksasi Russia terhadap Semenanjung Chrimia, Ukraina pada 2014. Sementara kasus-kasus dominasi suatu negara besar melalui hegemoni dapat ditinjau melalui kajian mendalam misalnya tentang hegemoni China di Indochina, hegemoni AS di Amerika Tengah, dan hegemoni Uni Soviet terhadap negara-negara Eropa Timur pada masanya.

Ketimpangan kekuatan antara negara kecil dan negara besar ini juga terjadi di kawasan Semenanjung Arab. Sepanjang pesisir Selatan dan Barat Semenanjung Arab, terdapat lima negara dengan ukuran yang mayoritas kecil, yaitu Oman, Yaman, Qatar, UEA, dan Bahrain. Kesemua negara ini dibayang-bayangi oleh Arab Saudi, yang secara kasat mata memiliki ukuran negara paling luas di kawasan, serta menguasai ujung Utara Semenanjung, hingga ke pesisir Barat. Persis seperti potensi yang telah disebutkan di atas, Arab Saudi hingga kini tampil sebagai aktor yang paling dominan di kawasan ini. Dominasi Saudi di kawasan juga dilakukan menggunakan semua cara yang tersedia, yaitu hegemoni dan invasi. Contoh nyata dominasi sudah sempat dibahas dalam bagian sebelumnya, yaitu bagaimana Saudi memotori negara-negara Teluk yang lain untuk memusuhi Qatar dan memutuskan hubungan diplomatik dengannya. Dapat terlihat seberapa besar pengaruh politik Arab Saudi di kawasan, hingga mampu membuat negara lainnya di kawasan mengeluarkan kebijakan luar negeri yang serupa. Saudi juga tidak segan menggunakan kekuatan fisik jika diperlukan. Contoh paling baru misalnya, intervensi militer yang dilancarkan Saudi, dalam wujud koalisi negara Arab, ke Yaman yang tengah mengalami perang saudara. Kapasitas regional inilah yang membuat negara-negara lain di sekitarnya cenderung bersikap 'cari aman' dengan mengeluarkan kebijakan yang berkiblat pada Arab Saudi.

kondisi seperti inilah yang mewarnai kehidupan hubungan internasional Qatar. Seperti yang telah dibahas dalam bagian terdahulu, sebelum 1990-an, kebijakan luar negeri Qatar cenderung menyesuaikan diri dengan kebijakan luar negeri Arab Saudi. Sama dengan yang dilakukan oleh negara-negara Teluk yang lain saat ini, 'cari aman'. Dalam istilah lain, kebijakan luar negeri Qatar pada fase tersebut bertujuan untuk *hedging* (mengikat) dengan Arab Saudi. Karakter ini kemudian mulai berubah seiring dengan bergantinya tonggak kepemimpinan di Qatar, dari Syekh Khalifa bin Hamad Al-Thani kepada anaknya, Syekh Hamad bin Khalifa Al-Thani. Sejak awal mula memegang jabatan, Syekh Hamad terus mendorong semangat liberalisasi politik pada negaranya (Sanromà, 2015, hal. 10). Agenda tersebut diaplikasikan secara komprehensif pada berbagai sektor pemerintahan Qatar, seperti pendidikan, ekonomi, hingga hubungan internasional. Pada sektor yang disebut terakhir, secara fundamental terdapat perubahan *mindset* yang dialami Qatar, dari yang awalnya meyakini untuk dapat bertahan hidup harus menyesuaikan diri dengan patron kekuatan yang ada, menjadi harus dikenal dan diketahui oleh banyak orang (*branding*). Hal ini membuat Qatar mulai mengambil jalan menuju politik luar negeri yang independen, atau dengan kata lain melepaskan diri dari bayang-bayang Arab Saudi. Kebijakan-kebijakan independen tersebut misalnya berperan aktif sebagai mediator konflik di kawasan Timur Tengah, proaktif dalam mendorong investasi modal ke negara-negara di kawasan lain, serta menginisiasi hubungan kerja sama dengan berbagai aktor di kawasan. Dipercayanya Qatar untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 merupakan satu dari sekian hasil kebijakan luar negeri yang berorientasi pada *branding* tersebut.

Di satu sisi, langkah yang diambil Qatar bukan tanpa hambatan. Arab Saudi, sebagai kekuatan dominan tradisional di kawasan, merasa memiliki pesaing baru di dalam diri Qatar. Selama dekade awal kepemimpinan Syekh Hamad, hubungan Qatar dengan Arab Saudi tidaklah begitu baik. Beberapa kali terjadi saling serang melalui media, utamanya kritik-kritik pedas yang dilancarkan pihak Qatar melalui salah satu investasi

liberalisasi politiknya, yaitu Al-Jazeera, terhadap pemerintahan kerajaan keluarga Saud. Arab Saudi merespon dengan menarik duta besarnya untuk Qatar, dari 2002 sampai 2008. Upaya-upaya tersebut dilakukan Arab Saudi untuk menekan manuver kebijakan luar negeri Qatar yang makin hari semakin tidak bisa dikendalikannya. Sialnya bagi Qatar, meski sudah terlepas dari hegemoni Arab Saudi, tapi tidak untuk tetangga-tetangganya yang lain seperti UEA dan Bahrain. Kedua negara tersebut masih mengekor Arab Saudi dalam kebijakan-kebijakan luar negeri strategis. Krisis yang terjadi baru-baru ini adalah sebuah pertunjukan kekuatan hegemoni Arab Saudi atas negara-negara Teluk terhadap Qatar.

Dalam konteks ini, IM, sebagai bagian dari *nested power* yang dimiliki oleh Qatar, masuk ke dalam upayanya untuk menginisiasi relasi dengan aktor-aktor lain di kawasan. Rasionalisasi dari aktivitas tersebut tentunya berkaitan erat dengan usaha Qatar untuk membangun politik luar negeri yang independen, atau tidak mengekor pada negara lain. Salah satu keunggulan pendekatan *nested power* sendiri adalah penggunaannya dapat membangun hubungan dengan banyak kekuatan, bahkan jika kekuatan ini saling bersitegang satu sama lain. Meski seperti itu, menggunakan *nested power* dengan cara ini tetap harus dibarengi dengan ke-hati-hati-an dalam mengaturnya sebagai upaya untuk memitigasi konsekuensi-konsekuensi negatif yang dapat terjadi (Al Horr dkk., 2016, hal. 355). Membangun hubungan dengan berbagai macam kekuatan menjadi salah satu cara meraih independensi kebijakan karena dengannya dapat mengurangi dominasi pengaruh satu kekuatan tertentu, sehingga mencegah terjadinya hegemoni. Dalam kerangka tata kekuatan kawasan, IM sendiri tidaklah termasuk ke dalam aktor tradisional, karena ia bukanlah negara. IM adalah aktor non-tradisional dalam wujudnya sebagai gerakan masyarakat transnasional. Kekuatan yang dimiliki oleh IM tidak terletak pada perangkat militer atau kekuatan ekonomi, tapi jaringan dan pengaruhnya yang berada di akar rumput masyarakat Arab. Memegang relasi dengan IM, maka Qatar telah mengamankan salah satu kekuatan besar gerakan rakyat di kawasan Teluk khususnya, dan Timur Tengah umumnya.

Selain memberikan penguat pijakan independensi politik Qatar, relasi dengan IM juga memperlancar pelaksanaan kebijakan luar negerinya di kawasan. Melalui jaringannya yang tersebar di kawasan Timur Tengah, IM memberikan akses bagi Qatar untuk bertindak sebagai seorang *intervensionist*. Hal ini adalah sebuah peningkatan dari apa yang sebelumnya biasa dilakukan oleh Qatar. Sebelumnya Qatar lebih sering tampil sebagai mediator konflik, terlibat sebagai penengah. Namun dengan adanya akses dari gerakan transnasional, keterlibatan Qatar lebih jelas mengarah pada satu pihak tertentu. Jaringan IM di berbagai negara Timur Tengah cenderung berposisi sebagai oposisi penguasa. Ini menjadi modal tersendiri bagi Qatar jika ingin meneruskan kepentingan nasionalnya di suatu negara, yaitu melalui intervensi dengan cara mendukung gerakan oposisi di negara tersebut.

Aktivitas ini sangat terlihat dari betapa aktifnya Qatar saat Arab Spring terjadi. Ulrichsen (2014, hal. 9) mencatat sebagai sebuah hasil dari relasi Qatar dengan tokoh-tokoh Islamis, Qatar memiliki koneksi kepada banyak pemimpin oposisi yang memainkan peran penting dalam revolusi yang saat itu terjadi di Tunisia, Mesir, Libya, Suriah dan

Yaman. Maka, lanjut Ulrichsen, setelah revolusi terjadi Qatar punya dua modal berharga untuk menanamkan posisinya sebagai kekuatan berpengaruh pada negara dan rezim yang sedang mengalami transisi, yaitu: jaringan tokoh-tokoh melalui para pencari suaka politik yang selama ini berlindung di Doha dan akan pulang ke negaranya, serta pengaruh institusional lewat IM yang muncul sebagai aktor kuat dalam transisi politik.

Keputusan Qatar sedikit mengubah haluan kebijakan luar negerinya menjadi lebih agresif dengan intervensi, bukanlah suatu hal yang aneh. *Interventionist* adalah cara selanjutnya bagi Qatar untuk menguatkan independensi politiknya. Metode ini memberikan kesan *branding* tersendiri bagi Qatar, meskipun akan diartikan berbeda-beda oleh aktor lain. Mengintervensi negara lain dapat menimbulkan citra pemberani, dan juga berbahaya di satu sisi, namun terlepas dari itu terdapat satu titik temu yang menguatkan posisi Qatar, mereka menjadi aktor yang diperhitungkan gerakannya. Dengan ini, Qatar menjadi sorotan aktor-aktor dunia yang lain. Semakin aktor-aktor lain meningkatkan perhatiannya pada Qatar, semakin independen kebijakan yang akan dijalankannya. Hegemoni atau pengaruh dari kekuatan-kekuatan regional kepada Qatar tentu akan menjadi isu dunia yang akan diperbincangkan dengan intens. Berbeda jika Qatar adalah sebuah negara kecil yang tidak memiliki citra, maka apapun yang terjadi terhadapnya bukanlah suatu prioritas untuk dibahas. Seperti inilah bagaimana Qatar menggunakan *nested power* yang ia miliki dalam dimensi regional di kawasan Timur Tengah.

Nested Power dalam Dimensi Global: IM dan Kepentingan Global Qatar

Dari segi politik, motivasi Qatar pada dimensi global berfokus pada upaya untuk meningkatkan *branding*-nya. Upaya ini merupakan bentuk lain dari cara Qatar bertahan hidup dalam menyikapi diri sebagai sebuah *small states*. Semakin kuat *branding* sebuah negara, semakin dia akan mendapatkan lebih banyak perhatian dari dunia internasional. Melalui atensi tersebut, kapasitas sebuah negara dalam mempengaruhi dunia akan meningkat. Bagi *small states*, kemampuan menjadi *influence* adalah sebuah hal yang berharga, karena secara tidak langsung mampu mengubah pandangan tentang predikat 'kecil' yang disandangnya. Qatar sendiri dalam mempermudah membangun *branding* ini juga menggunakan modal kekayaan yang berlimpah hasil dari perdagangan gas alam dan minyak buminya. Pengalokasian kekuatan ekonomi paling dapat terlihat dalam aktivitas Qatar memberikan berbagai jenis bantuan finansial di belahan dunia, mulai dari secara bilateral dengan suatu negara, secara langsung kepada masyarakat melalui perantara lembaga-lembaga amal, dan dalam skema multilateral melalui instansi-instansi pemerintahan internasional. Kedua motivasi Qatar pada dimensi global ini memperlihatkan bagaimana penggunaan salah satu bagian dari *nested power* yang dimilikinya, yaitu ekonomi.

Sementara itu, penggunaan relasi dengan IM pada dimensi global ditujukan untuk mendukung motivasi politik tersebut. Sasaran *branding* yang coba dimaksimalkan melalui relasi dengan IM lebih spesifik, yaitu komunitas muslim di berbagai belahan dunia. *Branding* pada sektor ini memiliki tujuan *prestise*-nya tersendiri terutama dari segi moralitas sebagai negara yang peduli dengan ummat Islam. Simpati dari ummat Islam di berbagai dunia tentu dapat menjadi suatu bentuk legitimasi yang kuat bagi sebuah negara Islam

untuk menjalankan berbagai kebijakannya baik di tingkat lokal maupun global. Mengamankan pengaruh terhadap komunitas muslim di berbagai negara juga menjadi penting karena sektor ini juga tidak luput dari persaingan antara Qatar dan negara-negara rivalnya. Arab Saudi misalnya, rival Qatar di kawasan ini juga memiliki pengaruh yang menjangkau komunitas muslim secara global lewat jaringan salafinya. Selain itu, aktor lain di kawasan, Iran, juga tentunya memiliki pengaruh kuat terhadap komunitas Islam Syi'ah di berbagai negara. Beruntungnya bagi Qatar, IM cukup berpengalaman dalam sektor ini. Luasnya jaringan IM di berbagai negara merupakan hasil dari strategi dakwah mereka yang strategis. Kemunculan mereka sebagai gerakan populis juga memperlihatkan bagaimana strategi dakwah tersebut mampu menjangkau banyak masyarakat dari berbagai golongan.

Masih sama seperti motivasi politik sebelumnya, Qatar juga memaksimalkan sumber daya ekonominya dalam melakukan *branding* terhadap komunitas-komunitas Muslim. Pendanaan yang masif diberikan oleh Qatar untuk berbagai hal seputar keummatan seperti pembangunan masjid, sekolah, pusat keislaman (*islamic center*), dan kegiatan-kegiatan keagamaan misal pengajian hingga konferensi ulama pada tingkat internasional. Dalam catatan yang dirilis oleh Malbrunot dan Chesnot berjudul "Qatar Paper," di kawasan Eropa sendiri, total 140 projek, utamanya masjid-masjid dan pusat-pusat keislaman, dibiayai secara langsung oleh Qatar selama delapan tahun ke belakang (Moubayed, 2019). Komunitas Muslim Eropa menjadi satu fokus tersendiri bagi Qatar, karena berdasarkan catatan di atas, aktivitas *branding* mereka sangat tersebar ke penjuru kawasan, mulai dari utara Norwegia sampai pantai Normandy, Prancis. Jejak-jejak pengaruh Qatar juga dapat ditemukan pada wilayah-wilayah lain di Eropa, seperti masjid di pulau Jersey, Inggris Raya; sekolah menengah atas Ibnu Rush di Lille, dan sebuah sekolah swasta di Bordeaux, Prancis; 50 projek serupa di Italia; dan aliran dana 3,6 juta Euro ke Swiss yang digunakan untuk membangun berbagai projek seperti pusat keislaman di Lausanne, museum peradaban Islam di Neuchatel, dan masjid di Bern. Malbrunot dan Chesnot menemukan aliran pendanaan tersebut berasal utamanya bersumber dari Qatar Charity, lembaga amal Qatar yang berafiliasi langsung kepada keluarga kerajaan. Program Qatar Charity di Eropa tersebut dinamakan *Ghaith Initiatives*; *ghaith* sendiri berarti hujan, bermakna berkah yang disalurkan oleh Tuhan kepada umat manusia untuk keberlangsungan kehidupannya (Charity, 2015). Nama tersebut juga menunjukkan motivasi Qatar untuk membentuk *brand* sebagai sebuah negara yang peduli dengan umat manusia, khususnya umat Islam, dengan menyalurkan berkah yang didapat dari Tuhan kepada mereka yang membutuhkan.

Sementara lembaga amal seperti Qatar Charity mengumpulkan dan memberikan dana segar, IM memiliki peran di tengah-tengah-nya, sebagai penyalur menuju komunitas-komunitas Muslim yang menjadi sasaran. Malbrunot dan Chesnot menyebutkan sembilan puluh persen aktivitas-aktivitas Qatar terhadap komunitas Muslim di Eropa terhubung kepada organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan IM melalui sebuah sistem yang efisien, canggih, dan legal (Moubayed, 2019). Konsep penyaluran yang dilakukan oleh IM hingga menyentuh tiap individu dalam komunitas yaitu dengan pembangunan berbagai prasarana keummatan tidak terlepas dari pemahaman keislaman yang mereka usung. Menurut mereka, agama (Islam) adalah suatu konsep yang menyeluruh, meliputi semua

aspek dalam kehidupan. Masih dalam catatan Malbrunot dan Chesnot, implementasi dari pemahaman tersebut kemudian dapat terlihat pada proyek-proyek Qatar terhadap komunitas Muslim di Eropa, membangun berbagai prasarana seperti sekolah, kolam renang, dan bahkan kamar mayat, di sekitar masjid, yang menjadi pusatnya (Moubayed, 2019). Meski kehadiran IM secara kasat mata tidak tampak pada proyek-proyek itu, bahkan juga melalui pengakuan dari pengurus prasarana tersebut, namun dari penelusuran lapangan Malbrunot dan Chesnot eksistensi IM dapat terasa di perpustakaan-perpustakaan masjid dan pusat keislamannya, yang menyimpan buku-buku dari tokoh-tokoh IM seperti Yusuf Qaradhawi dan Said Qutub. Keberhasilan dari proyek-proyek ini sendiri bagi Qatar adalah diakuinya mereka oleh ummat Islam sebagai sebuah negara penting yang punya kepedulian nyata terhadap urusan keummatan dan keagamaan. Suatu gambaran kecil dari keberhasilan ini misalnya dapat dilihat dari laporan *The National* (Crossland, 2012) tentang perkembangan komunitas muslim di Bavaria, Jerman. Berita tersebut melaporkan tokoh agama setempat menjadikan Qatar sebagai preferensi utama, di antara negara-negara Teluk dan Timur Tengah yang lain seperti UEA, Arab Saudi, ataupun Kuwait, untuk menjadi tujuan permohonan pendanaan fasilitas keagamaan di sana. Meski hanya satu gambaran kecil, tapi laporan tersebut menunjukkan apa tujuan akhir yang ingin diraih Qatar, yaitu menjadi satu kekuatan yang diperhitungkan di antara negara-negara yang lain dalam kawasannya.

Simpulan

Meskipun ditekan sedemikian rupa, Qatar tetap bersikukuh mempertahankan status-quo relasinya dengan IM. Alasan Qatar tidak merubah apapun terkait relasinya dengan IM dalam kajian ini coba dijelaskan dengan menggunakan teori *nested power*. Teori ini menjelaskan bagaimana sebuah negara mengamankan kepentingannya dalam tiga dimensi yang berbeda (lokal, regional, dan global) dengan menggunakan berbagai atribut-atribut kekuatan yang dimiliki. Kajian ini menemukan Qatar memiliki kepentingan terhadap IM dalam tiga dimensi tersebut, membuatnya sukar untuk melepaskan relasi yang sudah ada. Pada dimensi lokal, IM masih diperlukan untuk mengisi pos-pos di sektor pendidikan, utamanya pendidikan agama. Terlepas dari dipromosikannya sistem pendidikan ala Barat di Qatar, belakangan hal itu mendapat kritik dari masyarakat, dan pendidikan agama justru semakin meningkat peminatnya. Masih pada dimensi lokal, IM juga diperlukan untuk mempertahankan ruang-ruang stabilitas di tengah masyarakat Qatar. Tidak dapat dipungkiri geliat IM di Qatar berbeda dengan di negara lain. Kehadiran IM di suatu negara biasanya menjelma menjadi suatu gerakan oposisi, sementara di Qatar, IM justru berada dalam lingkaran penguasa. Hal ini memberikan Qatar posisi unik dimana gerakan oposisi berbasis Islamisme justru tidak muncul di negaranya, contohnya ketika Arab Spring lalu.

Dimensi selanjutnya adalah regional, atau dalam konteks Qatar kawasan Teluk Persia, dan Timur Tengah secara lebih general. IM, pada dimensi ini, memiliki peran penting dalam politik luar negeri Qatar. Motivasi terbesar Qatar dalam hal ini ialah keberlangsungan eksistensinya, mengingat secara riil ia adalah *small state*. Independensi

politik menjadi cara yang diambil Qatar guna mempertahankan dirinya. Sementara perimbangan kekuatan di kawasan Teluk masih dihegemoni oleh Arab Saudi, Qatar perlu modal-modal politik yang luas untuk dapat tetap berdiri sendiri. IM, sebagai kekuatan yang bergerak dalam ruang-ruang akar rumput masyarakat Timur Tengah, menjadi salah satu modal yang coba diamankan Qatar. Buah dari investasi yang dilakukan Qatar ini kembali dapat terlihat ketika Arab Spring terjadi. Kepercayaan diri Qatar berperan sebagai negara yang 'aktif' dalam mengurus gelombang demonstrasi di negara-negara Timur Tengah kala itu, tidak terlepas dari relasi yang terjalin dengan IM. Sebagai gerakan transnasional, IM memberikan akses bagi Qatar untuk meneruskan kepentingannya terhadap negara-negara di kawasan, melalui perantara jaringan-jaringan IM, yang seringnya berwujud gerakan oposisi. Melalui keaktifannya sebagai salah satu aktor penting dalam politik kawasan, Qatar secara tidak langsung juga turut menegaskan dan memperjuangkan independensi keberadaannya.

Terakhir, IM juga dibutuhkan oleh Qatar pada dimensi global. Masih sama seperti sebelumnya, karakter transnasional IM menjadi sebuah kelebihan yang coba dieksploitasi oleh Qatar. Perantaranya kini adalah diaspora jaringan IM yang tersebar di seluruh dunia, dalam berbagai komunitas muslim di berbagai negara. Kepentingan yang terakhir ini didorong oleh kebutuhan Qatar dalam membentuk *branding* negaranya di dunia internasional. *Branding* diperlukan untuk memperkuat eksistensi dan legitimasinya sebagai sebuah negara yang independen. Dalam konteks dengan IM ini, Qatar ingin mengamankan pengaruh terhadap ummat Islam di negara-negara lain. Caranya dengan menggunakan kekayaan berlimpahnya untuk membantu berbagai macam proyek-proyek keislaman. Aktivitas ini paling jelas bisa dilihat di Eropa, dimana aliran pendanaan yang bersumber dari Qatar banyak mengalir pada berbagai proyek seperti pembangunan masjid, sekolah, dan pusat keislaman (*Islamic Center*). IM memiliki peran sebagai 'orang tengah.' Sebagai gerakan yang berada langsung di tengah-tengah ummat Islam, orang-orang IM mengarahkan bagaimana aliran dana tersebut digunakan. Hal ini bisa ditilik dari implementasi pemahaman keislaman IM, yaitu 'Islam adalah agama yang menyeluruh,' dengan desain pembangunan proyek-proyek tersebut yang memusatkan pembangunan berbagai sarana, mulai dari restoran hingga kolam renang, dengan masjid sebagai titik sentralnya. Peran IM di sini menjadi penting, karena mengamankan pengaruh terhadap ummat Islam di dunia adalah urusan serius bagi Qatar, apalagi jika pada dimensi regional ia harus berhadapan langsung dengan negara seperti Arab Saudi, yang jelas pengaruhnya sangat kuat.

Daftar Pustaka

- Ake, C. (1975). A Definition of Political Stability. *Comparative Politics*, 271-283.
- Al Horr dkk., A. (2016). Qatar's Global-Local Nexus: From Soft to Nested Power. In M. E. Tok, L. R. Alkhater, L. A. Pal, & ed., *Policy-Making in a Transformative State, the Case of Qatar* (pp. 347-365). London: Palgrave Macmillan.
- al-Jazeera. (2017, June 19). *What is the Muslim Brotherhood?* Retrieved from Aljazeera: www.aljazeera.com
- Al-Kobaisi, A. J. (1979). *The Development of Education in Qatar, 1950 - 1977, with an Analysis of Some Educational Problems*. Durham: Durham University.
- Baskan, B. (2016). *Turkey and Qatar in the Tangled Geopolitics of Middle East*. New York: Palgrave Macmillan.
- BBC. (2017, Juli 19). *Qatar Crisis: What You Need to Know*. Diambil kembali dari BBC News: www.bbc.com
- Charity, Q. (2015, 9 8). *Qatar Charity Launches "Ghaith" (Rain) Initiative for Islamic Projects Worldwide*. Retrieved from Qatar Charity: <https://www.qcharity.org/>
- Crossland, D. (2012, July 11). *Bavaria Seeks Qatar Funding to Build Dh180m Mosque*. Retrieved from The National: www.thenational.ae
- Freer, C. (2018). *Rentier Islamism, the Influences of the Muslim Brotherhood in Gulf Monarchies*. New York: Oxford University Press.
- Hedges, M., & Cafiero, G. (2017). The GCC and the Muslim Brotherhood: What Does the Future Hold? . *Middle East Policy*, 129-153.
- Karoui, H. E. (2018). *The Islamist Factory (Short Version)*. Paris: Institut Montaigne.
- Moubayed, S. (2019, April 17). *How Qatar Funds Muslim Brotherhood Expansion in Europe*. Retrieved from Gulf News: www.gulfnews.com
- Nasser, R. (2017). Qatar's Educational Reform Past and Future: Challenges in Teacher Development. *Open Review of Educational Research*, 1-19.
- Radu, M. (2015). Political Stability - a Condition for Sustainable Growth in Romania? *Procedia Economics and Finance*, 751-757.
- Roberts, D. (2014). *Qatar and the Muslim Brotherhood: Pragmatism or Preference?* Retrieved from Middle East Policy Council: www.mepc.org
- Roberts, D. B. (2014, Maret 9). *Qatar, the Ikhwan, and Transnational Relations in the Gulf*. Retrieved from Project on Middle East Political Science: www.pomeps.org
- Sanromà, M. (2015). *Qatar During the Reign of Hamad Al Thani (1995-2013): From Soft Power to Hard Power*. Barcelona: Institut Català Internacional per la Pau.
- Thorhallsson, B. (2018). Studying Small States: A Review. *Small States & Territories*, 17-34.

Ulfah, M. N. (2016). Sejarah dan Strategi Dakwah Ikhwanul Muslimin. *Jurnal SMART: Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi*, 213-224.

Ulrichsen, K. C. (2014). *Qatar and the Arab Spring*. New York: Oxford University Press.

Warren, D. H. (2017, July 12). *Qatari Support for the Muslim Brotherhood is More Than Just Realpolitik, It has a Long, Personal History*. Retrieved from Maydan, Politics and Society: www.themaydan.com